

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

selanjutnya disebut sebagai *pihak pertama*.

N a m a : Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.
NIP. 197810222002121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1. Pidana	95%
			2. Perdata	95%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	90%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	9%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	95%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	25%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJIP minimal "BB"	A
		b.	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	95%
		d.	Nilai IKM	95%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	99%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	100%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	100%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	2
		h.	Jumlah layanan pengadilan	7
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	600
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum	240
		k.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l.	Jumlah pemeliharaan gedung	10
		m.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	4
		n.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	125
o.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12		
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	100%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Tahun 2023 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 7.093.905.000,00
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 7.078.905.000,00
	B. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 15.000.000,00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 257.500.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 232.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 24.000.000,00

Surabaya, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003


ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.
NIP. 197810222002121002